



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2024-2025
KE PROVINSI BALI**

*

**

**

*

JAKARTA 2024



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2024-2025
KE PROVINSI BALI
22-24 AGUSTUS 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawah DPR RI tanggal 25 Maret 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Mei 2024.

B. RUANG LINGKUP

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI diantaranya:

1. Meninjau secara langsung bagaimana pengelolaan agroforestry dan wisata alam di perhutanan sosial;
2. Meninjau secara langsung mengenai ketersediaan dan penyaluran pupuk dalam upaya peningkatan produksi dan pemenuhan pasokan pangan; dan
3. Meninjau kegiatan pengolahan ikan tuna dalam rangka ketahanan pangan, pengembangan industri perikanan di Indonesia berbasis ekspor.

D. SUSUNAN TIM

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Bapak Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik dilakukan pada tanggal 22-24 Agustus 2024 di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar, Provinsi Bali.

II. GAMBARAN UMUM

Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dan beribu kota di Kota Denpasar. Pulau Bali, yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Bali, memiliki beberapa julukan, di antaranya Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura.^[9] Pada tahun 2020, penduduk provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa, dengan kepadatan 747 jiwa/km², dan pada pertengahan 2024 berjumlah 4.361.106 jiwa

Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil di sebelah barat.^[13] Wilayah Pulau Bali sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara geografis, Bali terletak di 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain.

Gunung Agung adalah titik tertinggi di Bali setinggi 3.148 m. Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret 1963. Gunung Batur juga salah satu gunung yang ada di Bali. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi. Berbeda dengan di bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai.

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai.

Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Beratan atau Bedugul, Buyan, Tamblingan, dan Batur. Alam Bali yang indah menjadikan pulau Bali terkenal sebagai daerah wisata.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km² atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten, 1 kotamadya, 55 kecamatan, dan 701 desa/kelurahan.

Batas wilayah

Utara Laut Bali

Timur Selat Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selatan Samudera Hindia, Australia

Barat Selat Bali, Provinsi Jawa Timur

Sektor Pertanian di Bali

DUKUNGAN ALOKASI KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN PROVINSI BALI TA 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Jumlah Alokasi	33.850.112.036
A	Dukungan Pengembangan Komoditas Pertanian di Daerah (APBN)	18.428.865.000
1	Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan	4.166.885.000
-	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	1.610.000.000
-	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	2.154.885.000
-	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	342.000.000
-	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	60.000.000
2	Pengembangan Komoditas Hortikultura	1.446.640.000
-	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1.446.640.000
3	Pengembangan Komoditas Perkebunan	3.498.181.000
-	Penguatan Perlindungan Perkebunan	1.249.759.000
-	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1.795.200.000
-	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	453.222.000
4	Pengembangan Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.474.520.000
-	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	3.600.000.000
-	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	387.020.000
-	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	487.500.000
5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	2.072.567.000
-	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1.807.567.000
-	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	265.000.000
6	Dukungan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	2.770.072.000
-	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	2.770.072.000
B	Dukungan Pengembangan Pertanian Melalui UPT Pusat di Daerah (APBN)	5.565.312.000
1	Dukungan Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.653.312.000
-	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	2.478.134.000
-	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	669.984.000
-	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1.305.194.000
-	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	200.000.000
2	Dukungan Standardisasi Instrumen Pertanian	912.000.000
-	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	630.000.000
-	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	282.000.000
C	Dukungan DAK Bidang Pertanian	9.855.935.036
1	Kabupaten Buleleng	2.653.000.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber-sumber air (Irigasi air tanah dangkal/dalam, bangunan pelengkap irigasi)	1.103.000.000
-	Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan jalan Produksi)	200.000.000
-	Pembangunan Screenhouse Modern Pengembangan Komoditas Hortikultura	500.000.000
-	Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak (Ruminansia dan Unggas)	800.000.000
-	Sarana data dan informasi Balai Penyuluhan Pertanian	50.000.000
2	Kabupaten Karangasem	3.995.116.000
-	Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan jalan Produksi)	1.710.000.000
-	Pembangunan Screenhouse Modern Pengembangan Komoditas Hortikultura	475.116.000
-	Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak (Ruminansia dan Unggas)	760.000.000
-	Renovasi RPH-Ruminansia dan Unggas serta Penyediaan Sarana Pendukungnya	950.000.000
-	Sarana data dan informasi Balai Penyuluhan Pertanian	100.000.000
3	Kabupaten Tabanan	3.207.819.036
-	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber-sumber air (Irigasi air tanah dangkal/dalam, bangunan pelengkap irigasi)	220.000.000
-	Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan jalan Produksi)	800.000.000
-	Pembangunan Screenhouse Modern Pengembangan Komoditas Hortikultura	1.000.000.000
-	Renovasi RPH-Ruminansia dan Unggas serta Penyediaan Sarana Pendukungnya	1.087.819.036
-	Sarana data dan informasi Balai Penyuluhan Pertanian	100.000.000

Data Produksi Padi/Beras di Provinsi Bali

PRODUKTIVITAS PADI (KU/HA)

NO	KABUPATEN				Prognosa
		2021	2022	2023	2024
1	JEMBRANA	53,45	55,69	62,18	62,18
2	TABANAN	56,84	58,30	60,01	60,01
3	BADUNG	60,65	64,59	67,12	67,12
4	GIANYAR	60,20	64,95	67,46	67,46
5	KLUNGKUNG	62,46	62,17	64,73	64,73
6	BANGLI	50,68	53,46	52,14	52,14
7	KARANGASEM	60,36	60,28	62,92	62,92
8	BULELENG	58,95	56,19	54,61	54,61
9	DENPASAR	75,72	75,02	68,44	68,44
	BALI	58,78	60,71	62,24	62,24

LUAS TANAM PADI (HA)

NO	KABUPATEN				Prognosa
		2021	2022	2023	2024
1	JEMBRANA	9.519	10.628	6.368	9.778
2	TABANAN	38.035	33.053	31.589	34.599
3	BADUNG	19.703	17.895	16.831	16.836
4	GIANYAR	28.533	25.929	23.118	24.136
5	KLUNGKUNG	5.315	4.909	5.583	4.943
6	BANGLI	4.954	4.921	3.158	4.068
7	KARANGASEM	11.198	10.442	10.734	10.422
8	BULELENG	18.503	17.654	16.658	16.492
9	DENPASAR	3.477	3.035	3.069	3.085
	BALI	139.237	128.467	117.108	124.358

LUAS PANEN PADI (HA)

NO	KABUPATEN				Prognosa
		2021	2022	2023	2024
1	JEMBRANA	9.639	10.608	9.599	8.178
2	TABANAN	36.881	34.863	31.094	35.301
3	BADUNG	17.187	19.078	16.925	16.776
4	GIANYAR	26.904	29.024	23.182	22.731
5	KLUNGKUNG	4.853	5.549	4.936	5.200
6	BANGLI	5.118	4.608	3.857	3.636
7	KARANGASEM	11.025	10.654	10.583	10.233
8	BULELENG	18.042	17.685	17.522	15.478
9	DENPASAR	3.296	3.487	3.135	2.702
	BALI	132.944	135.557	120.833	120.235

PRODUKTIVITAS PADI (KU/HA)

NO	KABUPATEN				Prognosa
		2021	2022	2023	2024
1	JEMBRANA	53,45	55,69	62,18	62,18
2	TABANAN	56,84	58,30	60,01	60,01
3	BADUNG	60,65	64,59	67,12	67,12
4	GIANYAR	60,20	64,95	67,46	67,46
5	KLUNGKUNG	62,46	62,17	64,73	64,73
6	BANGLI	50,68	53,46	52,14	52,14
7	KARANGASEM	60,36	60,28	62,92	62,92
8	BULELENG	58,95	56,19	54,61	54,61
9	DENPASAR	75,72	75,02	68,44	68,44
	BALI	58,78	60,71	62,24	62,24

PRODUKSI PADI (TON GKG)

NO	KABUPATEN				Prognosa
		2021	2022	2023	2024
1	JEMBRANA	51.521	59.078	59.691	50.855
2	TABANAN	209.622	203.253	186.596	211.841
3	BADUNG	104.247	123.222	113.603	112.603
4	GIANYAR	161.967	188.518	156.396	153.356
5	KLUNGKUNG	30.309	34.502	31.952	33.659
6	BANGLI	25.935	24.635	20.113	18.958
7	KARANGASEM	66.544	64.219	66.590	64.386
8	BULELENG	106.366	99.365	95.686	84.525
9	DENPASAR	24.953	26.156	21.455	18.491
	BALI	781.465	822.949	752.080	748.674

PRODUKSI BERAS (TON)

NO	KABUPATEN				Prognosa
		2021	2022	2023	2024
1	JEMBRANA	32.258	36.989	37.372	31.840
2	TABANAN	131.244	127.257	116.828	132.634
3	BADUNG	65.269	77.149	71.127	70.500
4	GIANYAR	101.408	118.031	97.919	96.016
5	KLUNGKUNG	18.976	21.602	20.005	21.074
6	BANGLI	16.238	15.424	12.593	11.869
7	KARANGASEM	41.663	40.207	41.692	40.312
8	BULELENG	66.596	62.213	59.909	52.921
9	DENPASAR	15.623	16.376	13.433	11.577
	BALI	489.275	515.248	470.877	468.744

KET : Produksi Beras merupakan konversi dari produksi padi GKG 62,61%

Data tahun 2023 masih Angka Sementara

Data Tahun 2024 merupaka data Prognosa

Sektor Kelautan Perikanan di Bali

Kebijakan hilirisasi pada sektor kelautan dan perikanan telah memberikan dampak positif berupa peningkatan produksi, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja, dan adopsi teknologi serta mensuplai ketahanan pangan. Urutan pertama komoditas penyumbang strategis yakni udang, diikuti komoditas ikan tuna dan cakalang. Selanjutnya rumput laut dan garam menjadi potensial di Bali. Potensi perikanan unggulan tersebut saat ini sebagian besar diekspor dalam bentuk utuh beku dan segar. Sementara untuk bentuk olahan masih tergolong sedikit sekali. Terkait dengan ekspor dalam bentuk ikan utuh masih ada kendala, mengingat rantai pasok di hulu belum berjalan dengan baik karena kualitas mutu hasil tangkapan nelayan belum memenuhi standar industri pengolahan. Kedepan kebijakan hilirisasi pada sektor kelautan dan perikanan harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi stakeholder.

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ton)	
	2021	2022
Kab. Jembrana	22.434	24.014
Kab. Tabanan	3.864	3.880
Kab. Badung	9.202	8.095
Kab. Gianyar	1.697	1.730
Kab. Klungkung	18.369	17.702
Kab. Bangli	4.910	4.984
Kab. Karangasem	26.465	23.818
Kab. Buleleng	20.237	18.605
Kota Denpasar	34.402	31.029
Provinsi Bali	141.581	133.858

Keterangan Data :

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Adapun dalam pos pelayanan kapal ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan Benoa Denpasar, mencatat produksi tuna di Bali pada 2022 mencapai 27.037 ton. Jumlah tersebut turun dibandingkan 2021 yang mencapai 32.511 ton. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk membenahinya. Mengapa, karena kita ketahui bahwa produksi tuna dari sejumlah perairan laut lepas yang didaratkan di Bali itu diekspor ke Jepang dan sejumlah negara di Eropa dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan devisa negara.

Perhutanan Sosial dai Bali

1. Salah satu kebijakan strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan, telah dicanangkan program perhutanan sosial, yaitu Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
2. Perhutanan Sosial juga merupakan program Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Lapangan Kerja melalui kebijakan afirmatif negara yaitu yang **pertama**, pemberian akses lahan untuk mengurangi Ketimpangan penguasaan lahan yang berpotensi untuk konflik sosial sehingga akan mengganggu stabilitas negara. Yang **kedua**, memberikan kesempatan berusaha melalui fasilitasi pemberian akses modal dan akses pasar. Yang **Ketiga**, Peningkatan Kapasitas Petani Hutan melalui pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan nilai produk.
3. Dalam Konsep Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk memanfaatkan nilai strategis hutan, terdapat 3 (tiga) aspek pengelolaan yaitu **kelola sosial**, **kelola kawasan** dan **kelola ekonomi/usaha** sesuai dengan definitif hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan.
4. Capaian Perhutanan Sosial secara Nasional adalah seluas 8.018.575 Ha terdiri dari 10.952 Unit SK untuk penerima manfaat sebanyak 1.385.998 KK yang tersebar di Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, dari target yang dicanangkan Yth. Bapak Presiden RI seluas 12,7 juta ha.
5. Melalui program perhutanan sosial kelompok perhutanan sosial membentuk Kelompok Usaha (KUPS) yang dapat memanfaatkan hutan dengan pola agroforestry/ silvofshery/ silvopastura yang didasarkan pada Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) dengan memperhatikan kesepakatan ruang ekologis dan ruang usaha.
6. Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS), sampai saat ini telah terbentuk 14.174 KUPS (4 Skema PS diluar Hutan Adat) dan KUPS Adat Kearifan lokal berjumlah 162 KUPS dengan telah menghasilkan komoditas hasil hutan yang bernilai ekonomi berupa Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan

Bukan Kayu seperti kopi, madu, minyak atsiri, buah-buahan, tanaman pangan, getah karet/pinus, dan HHBK lainnya.

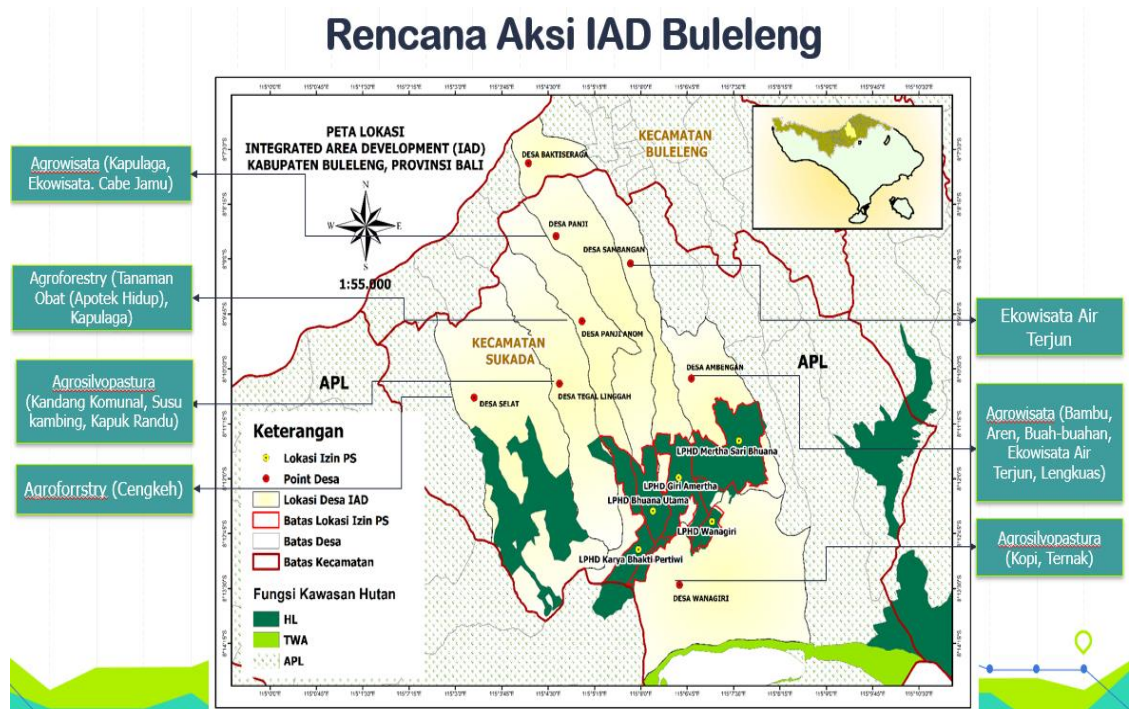
7. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Salah satu bentuk usaha untuk menambah tutupan lahan pada perhutanan sosial dapat melalui **pengembangan agroforestri**. Dengan agroforestri, Pemanfaatan lahan akan lebih optimal karena dapat dilakukan pada ruang kosong dibawah tegakan hutan sehingga akan memberikan manfaat pada aspek ekonomi, ekologi dan sosial.
8. Pengembangan agroforestry secara Nasional telah dikembangkan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan total lahan seluas 974.058 ha yang tersebar di semua Wilayah Balai PSKL.
9. Untuk **Pengelolaan Wisata alam (Ekowisata)** di perhutanan sosial menekankan pada prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat, prinsip ekonomi, prinsip pendidikan, dan prinsip pariwisata dengan Konsep dasar mendukung upaya perlindungan lingkungan (alam dan budaya), meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pengelolaan kegiatan wisata alam yang tepat tentunya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap alam, sehingga timbul “rasa memiliki” pada alam sekitar. Sampai dengan saat ini, sudah tersebar di 6 Balai PSKL dengan potensi jumlah KUPS sebanyak ± 876 KUPS.
10. Pada tahun 2023, terbit Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam melaksanakan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan melibatkan pihak terkait.
11. Sebagai upaya untuk implementasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemerintah mengembangkan Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial di berbagai daerah. Sinergi Kolaborasi Pengelolaan PS antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Program Perhutanan Sosial.

12. Salah satu Kabupaten yang telah mengembangkan IAD adalah Kabupaten Buleleng. Rencana aksi pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Buleleng yang saat ini sedang dikembangkan yaitu pengelolaan Agrowisata Agroforestry, Agrosilvopastura dan Ekowisata air Terjun.
13. Capaian Perhutanan Sosial di Kabupaten Buleleng adalah seluas 13.161,51 Ha terdiri dari 41 Unit SK untuk penerima manfaat sebanyak 39.565 KK.
14. Sampai saat ini telah terbentuk 83 KUPS dan telah menghasilkan komoditas hasil hutan yang bernilai ekonomi berupa Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa lingkungan. Hingga saat ini tercatat NILAI EKONOMI (NEKON) PS di Kabupaten Buleleng sebanyak **Rp. 12.052.029.500,-** (Sumber: GoKUPS).
15. Pentingnya memperhatikan upaya peningkatan skala ekonomi melalui kluster komoditi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas produk.
16. Pengembangan Agroforestry di Kabupaten Buleleng telah menghasilkan 11 jenis komoditas HHBK. Salah satu komoditas unggulannya yaitu kopi Agroforestry yang telah terbukti memiliki citra rasa yang sangat baik/specialty dan saat ini sedang dikembangkan oleh LPHD Wanagiri.
17. Selain agroforestry, Wisata alam di Kabupaten Buleleng yang masuk dalam lokasi izin perhutanan sosial juga tidak kalah eksisting yang menjadi daya Tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk dikunjungi. Terdapat 8 desa yang dan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam dengan tujuan kerjasama membangun rasa saling pengertian perihal pelestarian hutan dan penyelamatan Sumber Sumber air atau dengan slogan "Atas Nama Air".
18. Diharapkan dengan pengembangan pengelolaan Agroforestry dan wisata alam di perhutanan sosial dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan dasar kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
19. Selain itu, diharapkan juga dapat mendukung *Sustainable Development Goals* (SDG's) dengan Kontribusi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesetaraan gender, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga penanganan perubahan iklim.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

1. Lembaga Pengelola Hutan Desa Wanagiri, Buleleng

Pada saat diskusi terdapat beberapa aspirasi yang disampaikan, diantaranya permintaan untuk dilakukan pendampingan pengembangan komoditas kopi, bantuan ternak, serta pembinaan untuk hilirasi/pascapanen serta bantuan untuk memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang seperti kamar ganti dan toilet umum. Menanggapi hal tersebut, Tim Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti hal tersebut. Selain itu juga Tim Komisi IV DPR RI mendorong BUMN untuk terlibat dalam pengembangan agroforestry di Wanagiri melalui mekanisme CSR.



Perhutanan Sosial di Kabupaten Buleleng

Reliasasi : 13.161,51 Ha | ± 39,565 KK | 41 Unit SK



*Tersebar di 9 Kecamatan dan 29 Desa

Nilai Transaksi Ekonomi PS di Kabupaten Buleleng s.d 2024 Senilai:

Rp. 12.052.029.500,-

Sumber: <https://gokups.menlhk.go.id/>



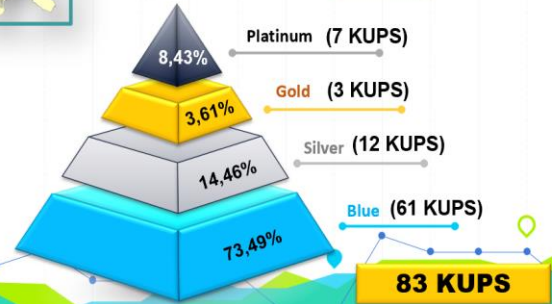
Skema Izin PS

HD = 29
HKM = 1
HTR = 1
Kulin KK = 10

Potensi Dominan

Ekowisata, Kopi, Anggrek, Madu, Silvopasture

Kategori Kelas KUPS Buleleng



AGROFORESTRY KABUPATEN BULELENG

Beberapa Komoditi agroforestry di Kabupaten Buleleng antara lain:

1. Kopi Agroforestry
2. Manggis
3. Jagung
4. Kemiri
5. Durian
6. Kacang
7. Umbi-umbian
8. Porang
9. Kunyit
10. Nangka dan
11. Bambu



Komoditi Unggulan Kopi Agroforestry (LPHD Wanagiri)

Surat Keputusan Gubernur Bali No. 2017/03-L/HK/2015 Tanggal 30 Oktober 2015

Di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

Jumlah Anggota : 925 KK
Luas areal : ± 250 Ha



Juara 1 Lomba Film Pendek Kopi Agroforestry Pada Festival Perdesa Kopi Agroforestry Tahun 2022

Kopi yang berasal dari dalam kawasan hutan telah terbukti memiliki citra rasa yang sangat baik/specialty. Ditanam dengan pola Agroforestry atau disebut Kopi Agroforestry dihasilkan oleh masyarakat lokal dengan pengelolaan hutan secara lestari.

Produk kopi yang dikembangkan adalah jenis robusta dan arabika. Penanaman kopi di dalam kawasan hutan secara organik dan teknik budidaya yang disesuaikan dengan topografi kawasan. Pemanenan hanya memetik cherry yang sudah merah dengan produksi kopi dapat mencapai 5 ton/tahun.



Petani memetik



Produk Kopi Wanagiri

WISATA ALAM KABUPATEN BULELENG

Selain agroforestry Wisata alam di Kabupaten Buleleng yang masuk dalam lokasi izin perhutanan sosial juga tidak kalah eksisting yang menjadi daya Tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk dikunjungi.

Salah satu tujuan wisata alam dalam perhutanan sosial yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan menjaga kelestarian hutan agar tetap lestari, sebagai contoh untuk menjaga kelestarian lingkungan dilakukannya kerjasama antar 8 desa yang dan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam.

1. Desa Panji
2. Desa Panj Anom
3. Desa Sambangan
4. Desa Ambengan
5. Desa Wanagiri
6. Desa Baktiseraga
7. Desa Tegalingga dan
8. Desa Selat

Dengan Tujuan Kerja sama yaitu “ membangun rasa saling pengertian perihal pelestarian hutan dan penyelamatan Sumber Sumber air.

ATAS NAMA AIR
KERJA SAMA 8 DESA
KAWASAN PERDESAAN DENBUKIT

Beberapa Wisata Alam di Kabupaten Buleleng

1. Air Terjun Kroya



2. Air Terjun Pucuk



3. Air Terjun Aling-aling



4. Air Terjun Jembong



5. Air Banyumala desa wanagiri



6. Air terjun bangiang

2. Gudang PT Pupuk Indonesia, Tabanan

Pada saat kunjungan, tim Komisi IV DPR RI mendapatkan gambaran mengenai progress persiapan Subsidi Langsung Pupuk kepada petani (SLP), yaitu telah dibuat konsep mekanisme penyesuaian, pencairan dana petani ke kios dan pelaporan bersama dengan kementan, kemenko perekonomian, bappenas, pihc dan perbankan (BRI dan BSI). Berkaitan dengan rencana Pilot Project BLP di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kelompok Substansi Pupuk Bersubsidi telah melaksanakan pendataan petani penerima pupuknya berdasarkan system eRDKK tahun 2024. Kemudian, Bappenas mengajukan konsep NDA dan PKS terkait pemadanan data antara eRDKK dan Regsosek. Konsep tersebut telah dikonsultasikan dengan Tim Kerja Hukum Ditjen PSP untuk koreksi dan hasil koreksi tersebut telah disampaikan kembali ke Bappenas. Adapun updaters mengenai persiapan kebijakan SLP ini diantaranya adalah:

- a. Rencana Pilot Project BLP dimundurkan jadwalnya menjadi dipertengahan tahun 2025 dengan lokasi hasil kesepakatan diubah menjadi di 2 kabupaten yaitu di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Hal tersebut mengingat besaran biaya yang dibutuhkan.

- b. Dalam pelaksanaannya Bappenas mengajukan kerjasama dengan World Bank dengan target pelaksanaan di tahun 2025.
- c. Akan dilaksanakan kajian terhadap kesuburan lahan diwilayah ujicoba untuk memastikan komoditas yang cocok ditanam, serta kebutuhan pupuknya oleh konsultan bekerjasama dengan Kementan (BSIP dan PSP-Dit.Lahan)
- d. Hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan pengambilan keputusan oleh seluruh pihak terkait.
- e. Telah dilakukan Survei Lapangan oleh Bappenas, world Bank, PIHC, Sesditjen PSP, Dinas Pertanian Kabupaten pada tanggal 17 – 19 Juli 2024 Ke Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur (masing masing kabupaten di 1 kecamatan) yang hasilnya akan digunakan dalam perumusan rencana *Piloting BLP*.
- f. Hari terakhir survey lapangan tanggal 19 Juli dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) secara *online* dan *offline* dengan agenda Pemaparan Awal Hasil *Scoping Visit* untuk perumusan kegiatan *Pilot Project BLP* di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
- g. Kementan dalam hal ini Ditjen PSP masih menunggu terbitnya payung hukum pelaksanaan kegiatan SLP (Keppres atau Inpres) dari Kemenko Perekonomian.

Beberapa hal lain yang menjadi catatan dan pembahasan diantaranya permasalahan terkait pupuk, penyuluh pertanian, dan infrastruktur pertanian. Belum adanya mekanisme penyaluran yang tepat, mudah diterapkan dan tidak ada penyimpangan menjadi salah satu hal yang juga menjadi sorotan. Selain itu masalah kekurangan tenaga penyuluh pertanian di desa-desa, akibat banyak penyuluh yang sudah pensiun tidak memiliki pengganti, sehingga sulit untuk memastikan setiap desa memiliki penyuluh yang cukup. Tentu saja hal ini dapat berdampak pada efektifitas penerapan dan penyebaran kebijakan pertanian. Untuk itu, harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah pupuk, penyuluh pertanian, dan infrastruktur pertanian demi kesejahteraan petani dan peningkatan produktivitas sektor pertanian di Indonesia.

3. Unit Pengolahan Ikan Tuna Bandar Nelayan

PT Bandar Nelayan merupakan salah satu eksportir produk perikanan yang telah berdiri sejak tahun 1996. Berbagai produk hasil tangkapan yang dihasilkan antara lain: Tuna, Marlin, Tongkol, Tenggiri, Cumi dan berbagai jenis ikan demersal. Perusahaan ini telah memiliki unit pengolahan ikan dan telah melakukan ekspor ke berbagai negara, diantaranya Amerika Serikat, Jepang, China, Taiwan, Viet Nam dan Korea.

Dalam diskusi yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyebutkan bahwa pemerintah provinsi mengapresiasi terhadap pemerintah pusat yang telah banyak membantu dalam proses perijinan dan jaminan mutu produk hasil kelautan dan perikanan. Hal menjadikan tidak ada hambatan tentang ekspor ikan tuna di Bali ke negara tujuan. Terbukti saat terjadi pandemi Covid-19 ekspor ikan dari Bali cenderung masih beroperasi dengan relatif normal. Hal ini menandakan sistem bisnis sektor ini masih sangat menjanjikan untuk penerimaan devisa negara dan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat.

Sementara dari pandangan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan beberapa catatan yakni:

- a. Akan terus berupaya mendorong penerapan konsep ekonomi biru untuk mewujudkan keseimbangan dalam ekosistem kelautan yaitu keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Konsep ekonomi biru selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, juga dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Akan melakukan perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan. Implementasi lima program tersebut untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pesisir, dengan mengedepankan produksi perikanan yang bertanggung jawab pada keberlanjutan ekosistem.
- c. Akan terus meningkatkan ekspor ikan. Tercatat tahun 2023 ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia mencapai US\$5,63 miliar,

sedangkan impor produk kelautan dan perikanan Indonesia pada tahun yang sama sebesar US\$0,65 miliar, sehingga neraca perdagangan produk kelautan dan perikanan Indonesia surplus sebesar US\$4,98 miliar. Pencapaian ini tak lepas dari dukungan para pelaku usaha kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. Salah satunya PT Bandar Nelayan yang berlokasi di Benoa, Bali.

- d. Akan terus melaksanakan kegiatan pengembangan standar produk perikanan Indonesia, pembinaan kepada para pelaku usaha, fasilitasi promosi melalui pameran di dalam dan luar negeri, serta penguatan dan penumbuhan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam upaya mengembangkan industri pengolahan ikan di dalam negeri.
- e. Akan mendorong dan mengembangkan Industri perikanan melalui sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, serta media massa. Hal ini penting untuk mendukung upaya Indonesia menjadi salah satu negara eksportir produk perikanan terbesar di dunia.

Sementara saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam pertemuan diantaranya menyampaikan bahwa tuna merupakan ikan yang membentuk gerombolan dan hidup di perairan tropis sampai subtropics. Jenis ikan tuna yang terpenting dalam perdagangan adalah Yellowfin, Bigeye, Southern Bluefin Tuna, Northern Bluefin, Albacore dan Skipjack (Cakalang). Indonesia memiliki sumber daya ikan yang melimpah, bahkan memiliki wilayah dengan sumber ikan tuna terbesar di dunia, dengan nilai jual ikan tuna yang sangatlah besar, pemerintahpun telah hadir memberikan perhatian khusus yaitu dengan melakukan pemetaan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPRI).

Selanjutnya peran kebijakan pemerintah dan peran perusahaan telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang cukup besar, dimana sinergitas teknologi informasi harus mampu menjawab tantangan kekinian sehingga benar-benar meningkatkan ekonomi nelayan. Tentunya pelaku usaha telah memegang prinsip keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Dibuktikan dengan tidak melakukan praktek IUU fishing dan Destructive Fishing di perairan. Untuk itu, Komisi IV DPR RI terus menyampaikan pesan bahwa armada kapal penangkap ikan wajib

menggunakan alat tangkap yang memenuhi aturan yang berlaku agar aspek ekonomi dan ekologi dapat sejalan berdampingan. Adapun pemerintah perlu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai untuk industri tuna sehingga “Industri Perikanan Tuna Indonesia dapat bangkit cepat sebagai produsen ikan dunia dan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa,”

Selain itu, Komisi IV DPR RI berharap kedepan sektor kelautan dan perikanan dapat meningkatkan PNBP dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang bijaksana dengan mengeluarkan regulasi dan pengawasan serta himbauan agar nelayan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Berbeda dengan negara Belanda yang membolehkan alat tangkap pukot harimau, karena disana tidak di modifikasi sebagaimana di Indonesia sehingga tidak dilarang.

Adapun terkait kebijakan rencana pemindahan Pelabuhan Perikanan Benoa ke Pelabuhan Pengambangan di Kab. Jembrana, Komisi IV DPR RI mengharapkan kajian studinya wajib didalami dengan baik agar kedepan tidak bermasalah. Misalnya fasilitas sarana prasarana, waktu biaya, serta kenyamanan dan keamanan kapal saat berlabuh serta tingkat keselamatan awak buah kapal (ABK) juga menjadi prioritas utama, dan yang tidak boleh tertinggal adalah koordinasi dengan pemerintah setempat harus terus dilakukan dan wajib melibatkan masyarakat dalam “urun rembug” tata kelola Pelabuhan Perikanan Pengambangan.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan produksi pertanian/komoditas pangan guna menjaga ketersediaan pangan nasional, termasuk didalamnya produksi jagung untuk pakan guna menjamin pasokan pakan ternak unggas yang murah dan berkualitas bagi peternak.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus meningkatkan ekspor perikanan berbasis komoditas unggulan guna kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha serta pemasukan devisa negara. Selain itu, meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji secara dalam rencana pemindahan Pelabuhan Perikanan Benoa

ke Pelabuhan Pengambengan di Kab. Jembrana agar tidak ada masalah dikemudian hari dari aspek ekologi, ekonomi, serta sosial dan budaya.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkolaborasi dengan beberapa kementerian yang memiliki program kerja yang beririsan dengan perhutanan sosial seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan BUMN agar petani hutan dan tergabung dalam kelompok petani hutan (KTH) dapat meningkatkan pengelolaan persetujuan perhutanan sosial.
4. Komisi IV DPR RI meminta BUMN, Pupuk Indonesia dapat mendukung pembangunan dan pengelolaan perhutanan sosial di KTH Wanagiri melalui program corporate social responsibility.

V. PENUTUP

Demikian Laporan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali. Berdasarkan temuan, aspirasi, permasalahan, perkembangan, dan informasi yang diperoleh terkait dengan lokasi tersebut, Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Mitra Komisi IV DPR RI. Diharapkan, Kunjungan Spesifik ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2024

Ketua Tim,

Ttd

Sudin, S.E.
A-151

DOKUMENTASI



MEDIA

1. https://monitor.co.id/2024/08/26/komisi-iv-soroti-persoalan-pupuk-penyuluh-pertanian-dan-infrastruktur-di-bali/#google_vignette
2. <https://www.perikanan.denpasarkota.go.id/berita/kunjungan-komisi-iv-dpr-ri-pada-pt-bandar-nelayan-pelabuhan-benoa>
3. <https://emedia.dpr.go.id/2024/08/26/komisi-iv-soroti-persoalan-pupuk-penyuluh-pertanian-dan-infrastruktur-di-tabanan-bali/>
4. https://www.instagram.com/dlhkabbuleleng/p/C--eeUHTPsp/?img_index=1
5. <https://riapos.jawapos.com/riau/2255009458/kunker-spesifik-komisi-iv-apresiasi-pengelolaan-hutan-sosial-di-bali>